

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021

PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI MAMBERAMO RAYA TAHUN 2020

ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN JAWABAN
TERMOHON, KETERANGAN BAWASLU, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, PENGESAHAN ALAT BUKTI)
(II)

JAKARTA,

SENIN, 8 FEBRUARI 2021



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020

PEMOHON

- 1. Dorinus Dasinapa, Andris Paris Yosafat Maay (Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021)
- 2. Robby Wilson Rumansara, Lukas Jantje Puny (Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

KPU Kabupaten Mamberamo Raya

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, Pengesahan Alat Bukti) (II)

Senin, 8 Februari 2021, Pukul 8.14 – 9.54 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Anwar Usman (Ketua)
2) Wahiduddin Adams (Anggota)
3) Enny Nurbaningsih (Anggota)

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021:

- 1. Billy Marcelino Maniagasi
- 2. Tommy Albert Lumban Tobing

B. Pemohon Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021:

- 1. Robby Wilson Rumansara
- 2. Lukas Jantje

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021:

- 1. Cosmas E Refra
- 2. Sukardin
- 3. Raidin Anom
- 4. Gabriel Reong Radja
- 5. Achmad Husein Borut
- 6. Teddy Subrata
- 7. Iman Ali Rahman
- 8. Yofnedi
- 9. Gilbert Marciano Tulaar

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021:

- 1. Baharuddin Farawowan
- 2. Eliezer Murafer
- 3. Yusman

E. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021:

- 1. Latifah Anum Siregar
- 2. Wehelmina Morin
- 3. Helmi

F. Termohon:

- 1. Bapak Melkianus Kambu (KPU Mamberamo Raya)
- 2. Diana Dorthea Simbiak (KPU Mamberamo Raya)

G. Bawaslu:

- 1. Cornelia H. Mamoribo (Bawaslu Mamberamo Raya)
- 2. Zaenal Sineri (Bawaslu Kabupaten Mamberamo)
- 3. Metu Salack Kowi (Bawaslu Kabupaten Mamberamo)
- 4. Anugrah Pata (Bawaslu Provinsi Papua)
- 5. Ronald Manoach (Bawaslu Provinsi Papua)
- 6. Amandus Situmorang (Bawaslu Provinsi Papua)
- 7. Tjipto Wibowo (Bawaslu Provinsi Papua)
- 8. Jamaluddin Lado Rua (Bawaslu Provinsi Papua)

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.14

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sidang lanjutan Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Mamberamo dan Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021 ... Oh Mamberamo Raya, ya, mohon maaf. Kabupaten Mamberamo Raya, dan Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021 juga Kabupaten Mamberamo Raya, ya, jadi ada 2 Pemohon.

Agendanya adalah penyampaian jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti Para Pihak.

Dipersilakan Pemohon Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021 untuk menyampaikan pokok-pokok. Ini untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Billy Marcelino Maniagasi, S.H. Rekan saya di belakang, Tommy Albert Lumban Tobing, S.H.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian, Pemohon Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021!

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: COSMAS REFRA

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir Kuasa Hukum Pemohon, saya sendiri, Cosmas Refra dan di belakang saya, Pak Sukardin dan kawan-kawan kami yang lain secara daring, mendampingi Prinsipal, Pak Robby

Wilson Rumansara dan Lukas Jantje, di dampingi kawan-kawan, Raidin Anom, Gabriel Reong Radja, Achmad Husein Borut, Teddy Subrata, Iman Ali Rahman, Yofnedy, Gilbert Marciano Tulaar. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sekarang, Termohon, ya, Membrano ... Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021 ya sekaligus kan satu Kuasa Hukum ya tentunya. Ya, silakan!

8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir, kami Kuasa Hukum, Latifah Anum Siregar dan Helmi. Hadir secara daring, Wehelmina Morin, bersama kami Komisioner KPU Provinsi Papua, selaku KPU Kabupaten Mamberamo Raya, ada Komisioner Ibu Diana Dorthea Simbiak dan Komisioner Bapak Melkianus Kambu. Hadir secara daring Komisioner Kabupaten Mamberamo Raya. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, jadi untuk 2 nomor ya ...

10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Ya.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021.

12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Ya.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Sekarang, Pihak Terkait. Juga sekaligus, ya? Untuk Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021, silakan!

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: ELIEZER MURAFER

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021. Saya sendiri Eliezer Murafer dan bersama teman saya disebelah, Baharuddin Farawowan. Dan yang melalui daring Yusman. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Ya, Bawaslu, silakan! Sama ya ...

BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: CORNELIA MAMORIBO

Ya, terima kasih.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021, ya.

17. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: CORNELIA MAMORIBO

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi untuk kita sekalian. Dari Bawaslu kami datang dengan perkara yang sama, Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021. Saya akan perkenalkan diri. Nama saya Cornelia Mamoribo, ketua Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya. Didampingi oleh kedua teman saya, Pak Zaenal Sineri, di sebelah kiri saya. Dan juga teman saya, Pak Metu Salack Kowi dan kami didampingi oleh Pak Anugrah Pata dari Bawaslu Provinsi. Kemudian juga ada pimpinan kami yang ikut secara daring, Pak Jamaluddin Lado Rua dan Bapak Amandus Situmorang, Bapak Tjipto Wibowo dan Bapak Ronald Manoach. Terima kasih.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, selanjutnya. Sidang dipimpin Yang Mulia Prof Enny. Silakan!

19. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, terima kasih, Pak Ketua. Saya lanjutkan, pada kesempatan ini sebelum saya sampaikan waktunya untuk Termohon menyampaikan jawaban, saya persilakan nanti bagi Termohon, kemudian Pihak Terkait atau Bawaslu, kalau ada renvoi silakan disampaikan di awal ya, pada waktunya masing-masing. Tetapi hanya renvoi yang sifatnya typo saya, ya? Tidak mengubah angka atau nama yang menyebabkan sifatnya nanti berubah disitu menjadi subtantif, ya, dan waktunya nanti tolong diefektifkan hanya sekitar 10 menit ya, Bu, ya. Silakan, Bu!

20. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Terima kasih, Yang Mulia. Kami langsung renvoi pada halaman pertama itu, hanya untuk tulisan Surat Kuasa khusus nomor 0 ...

21. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Halaman berapa?

22. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Halaman 1.

23. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya?

24. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Ini untuk Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021.

25. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini, Ibu enggak ada halamannya, ya, jawabannya, ya?

26. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Ada, Yang Mulia.

27. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di halamannya ...

28. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Di paling belakang, di paling bawah ...

29. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya? Oh ya, enggak keliatan, kecil sekali, ya.

30. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Ya. Hanya untuk nomor Surat Kuasa dari 02 menjadi 01.

31. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

01 kuasanya?

32. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Ya, baik.

33. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan! Untuk Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021, ya?

34. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Terima kasih ... ya.

35. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan!

36. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Nomor Urut 1 atas nama Dorinus Dasinapa, S.S., S.Sos., dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H.

- 1. Dalam eksepsi.
 - 1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.
 - 1.2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Menurut Termohon.

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 dalam Perkara Nomor 81 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut.

- 1) Dianggap dibacakan.
- 2) Dianggap dibacakan.
- 3) Dianggap dibacakan.
- 4) Bahwa jika dilihat jumlah perolehan suara dan selisih antara Pemohon dan Pihak Terkait pada angka 1 dikaitkan dengan ambang batas perbedaan suara sebesar 2% sesuai jumlah penduduk Kabupaten Mamberamo Raya di bawah 250.000 untuk bisa mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, maka perhitungan persentase selisihan perolehan suara adalah sebagai berikut.
 - 4.1 Total jumlah penduduk Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 adalah sebanyak 38.203 jiwa.
 - 4.2 Dianggap dibacakan.
 - 4.3 Perolehan suara adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1: Dorinus Dasinapa, AKS, S.Sos., dan

Andris Paris Yosafat Maay, S.H., sebanyak 4.929 suara.

Pasangan calon nomor urut 4: Dr. (H.C) John Tabo, S.E., M.B.A. dan Ever Mudumi, S.Sos., Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 8.577 suara.

- 4.4 Perolehan suara sah sebanyak 25.136 suara. Sehingga 2% dari perolehan suara sah adalah sebanyak 502,72 suara atau dibulatkan 502 suara. Adapun selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon adalah sebesar 3.648 suara atau 14,51%. Maka permohonan Pemohon tidak memenuhi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) dan seterusnya.
- 5) Dianggap dibacakan.
- 6) Dianggap dibacakan.
- 7) Dianggap dibacakan.
- 8) Dianggap dibacakan.
- 9) Dianggap dibacakan.
- 10) Dianggap dibacakan.
- 11) Dianggap dibacakan.
- 1.3. Tenggang waktu pengajuan permohonan.
 - 1) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
 - 2) Dianggap dibacakan.
 - 3) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 diumumkan oleh Termohon tanggal 16 Desember 2020, pukul 13.45 melalui rapat pleno yang secara terbuka yang dihadiri saksi pasangan calon. Dengan demikian, tenggang waktu 3 hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah tanggal 16 Desember 2020, 17 Desember 2020, dan tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIT.
 - 4) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Desember 2020, pukul 03.06 sesuai akta pengajuan permohonan Nomor 82/PAN.MK dan seterusnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 157 ayat (5) dan seterusnya.

- 1.4. Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel).
 - 1) Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 menyatakan:
 - a) Alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 - b) Petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 - 2) Bahwa dalam posita Pemohon mempersoalkan tentang pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi di 8 distrik. Dimana hal tersebut merupakan kewenangan Bawaslu berdasarkan Pasal 153A ayat (2) dan seterusnya.
 - 3) Bahwa dalam posita Pemohon pada halaman 7-8 pada angka 17-25 tidak jelas. Pemohon mempersoalkan tentang pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, dimana merupakan kewenangan Bawaslu berdasarkan Pasal 135A ayat (2) dan seterusnya.
 - 4) Bahwa pada petitum Pemohon halaman 11 tidak jelas karena Pemohon meminta dilakukan penyelesaian terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan masif, dimana hal tersebut merupakan kewenangan Bawaslu berdasarkan Pasal 135 ayat (a).

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan tersebut sebagaimana di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan dalam Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon, tidak jelas. Atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

II. Dalam pokok-pokok Permohonan.

- 1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Termohon. 2,3,4,5, dan 6, dan 7 dianggap dibacakan.
- 8. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon. Perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut. Nomor Pasangan Calon Perolehan Suara Persentase;
 - 1. Dorinus Dasinapa AKS., S.Sos., dan Andristaris Yulsafat Maay, S.H., Pemohon=4.929 suara atau 19,61%.
 - 2. Robby Wilson Rumansara, S.P., M.H., dan Lukas Yance Puny, S.Pd.=6.015 suara atau 23,93%
 - 3. Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti=5.615 suara atau 22,34%
 - 4. Dr. (H.C) John Tabu, S.E., MBA dan Ever Mudumi, S.Sos.,= 8.777 suara atau 34,12%

Jumlah suara sah=25.136 suara.

9. Bahwa, bedasarkan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah=4.929 suara atau 19,61% atau berada di peringkat ke-4 dari pelo ... perolehan suara dari 4 pasangan calon.

Nomor 10, 11, 12 dianggap dibacakan.

- 13. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 pada pokok permohonannya yang mendalilkan bahwa selisih perolehan Pemohon dikarenakan adanya pelanggaran suara administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 02, Nomor Urut 03, dan Nomor Urut 04 secara terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi di 8 distrik, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Namun, Pemohon tidak mampu menjelaskan pelanggaran dimaksud. Selain itu, pelanggaran administrasi adalah jelas-jelas merupakan kewenangan dari Bawaslu. Bedasarkan Pasal 15 ... 135 A ayat (2) dan seterusnya.
- 14. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6 pada pokok permohonannya, yang pada intinya menerangkan adanya politik uang. Hal ini menjadi kewenangan dari Bawaslu untuk menindak lanjutinya dalam proses pidana pemilu sebagaimana Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), dan seterusnya. Poin 15 dianggap dibacakan.
- 16. Bahwa, terhadap dalil Pemohon pada angka 11, Pemohon mendalilkan telah terjadi kecurangan di beberapa TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur. Namun, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara pasti dan tepat pada TPS berapa kecurangan tersebut terjadi. Pemohon tidak mampu

- menunjukkan daftar pemilih tetap dan perolehan suara untuk Distrik Mamberamo Tengah Timur.
- Selebihnya, 16.1 dan 16.2 dianggap dibacakan.
- 17. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6 halaman 5, terkait dugaan pelanggaran politik uang yang diduga dilakukan oleh Paslon ... Pasangan ... Paslon Nomor Urut 03 dan Nomor Urut 04. faktanya, keberatan-keberatan tersebut tidak diketahui oleh Termohon dan disampaikan pada saat rekapitulasi di tingkat BPD pada Disttrik Mamba ... Mamberamo Hulu, Distrik Mamberamo Tengah Timur, Distrik Mam ... Mamberamo Tengah, Distrik Rufaet, dan Distrik Sawai. Adapun dugaan politik uang yang ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten terkait Paslon Nomor Urut 03 yang mana telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sebagai pelanggaran pidana. Dengan masing-masing terpidana Maks Krak ... Krakuko, Banni Kujiro, dan Kristian Wanimbo di sidang di PN Jayapura dengan Nomor Perkara 16/Pid.Sus dan seterusnya, 17/Pid.Sus dan seterusnya, 18/Pid.Sus dan seterusnya, dan ketiganya telah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana politik uang dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati dengan putusan pidana dan seterusnya.
 - 17.1 dianggap dibacakan.
 - 17.2 dianggap dibacakan.
 - 17.3 dianggap dibacakan.
 - 17.4 dianggap dibacakan.
- 18. Dianggap dibacakan.
- 19. Bahwa, Termohon telah menindak lanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya setelah menyiapkan kronologis dan berita acara. Adapun terkait rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, Termohon telah mengeluarkan SK sebanyak 3 SK. Kronologis, berita acara, rekomendasi, dan tindak lanjut.
 - 1. Kronologis 477 dan seterusnya, dianggap dibacakan.
 - 2. Berita Acara Nomor 86 dan seterusnya.
 - 3. Rekomendasi Bawaslu, Nomor 197 dan seterusnya.
 - 4. Keputusan KPU Mamberamo Raya dan seterusnya.

37. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan saja ini.

38. KUASA HUKUM TERMOHON 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Dianggap dibacakan.

20. Bahwa, terha ... Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 15 sampai dengan angka 30, pada pokoknya permohonan adalah sang ... permohonannya adalah sangat keliru dan tidak memiliki relevansi terkait dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) dan seterusnya.

Bahwa dengan demikian menurut Termohon, dalil permohonan yan disampaikan oleh Pemohon pada pokoknya secara keseluruhan, pada prinsipnya tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf b poin keempat PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang menegaskan alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian menurut Termohon, dalil yang digunakan Pemohon tidak terkait dengan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

III. Petitum.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara.

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020, pukul 13.45 WIT.
- 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2020 yang benar menurut Termohon berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 20/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 13.45 WIT sebagai berikut.

- 1. Nama Pasangan Calon, Dorinus Dasinapa, S.Sos., dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H., (Pemohon) perolehan suara=4.929.
- 2. Robby Wilson Rumansara, S.P., M.H., dan Lukas Jantje Puny, S.Pd.,=6.015 suara.
- 3. Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti=5.615 suara.
- 4. Dr. (H.C) Jhon Tabo, S.E., M.BA., dan Ever Mudumi, S.Sos.,=8.577 suara.

Total suara sah=25.136 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Kuasa Hukum Termohon, Latifah Anum Siregar, Helmi, Wehelmina Morin. Terima kasih, Yang Mulia.

39. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih. Silakan sekarang Pihak Terkait juga sama, ya, waktunya sekitar 10 menit dan disampaikan pokok-pokoknya saja. Untuk Perkara 81/PHP-BUP.XIX/2021, ya, Pak. Silakan, Pak.

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 72/PHP.BUP-XIX/2021: BAHARUDDIN FARAWOWAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya membacakan Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 81/PHP.BUP.XIX/2021.

Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Nomor Urut 1 atas nama Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos., dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang bertentangan di bawah ini dan seterusnya dianggap dibacakan sebagaimana Bukti PT-1 sampai dengan PT-6.

Dalam hal ini memberikan keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Dorinus Dosinapa, AKS, S.Sos., dan Andris Paris Yosafat Maay, Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2020 dengan Nomor Urut 1 sebagai berikut.

Eksepsi atau kewenangan dianggap dibacakan.

Kedudukan hukum.

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi sesuai peraturan perundangundangan sebagaimana hal mana yang didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut.

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan, dan seterusnya dianggap dibacakan.
- Bahwa berdasarkan data kependudukan dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2020 dalam laman website Mahkamah Konstitusi dalam Info Pilkada Serentak 2020. Jumlah penduduk Mamberamo Raya adalah sebanyak 38.203 jiwa.
- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk dapat mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya ke Mahkamah Konstitusi. Selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak tidak melebihi 2% dari jumlah total suara yang sah yang diperoleh seluruh pasangan calon berdasarkan rekaptiulasi hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya.
- 4. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perhitungan Tingkat Kabupaten Pemlihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 16 Desember 2020. Adapun hasil perhitungan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 adalah sebagai berikut, dan seterusnya dianggap dibacakan.
- 5. Bahwa 2% dari 25.136 suara adalah=502,72 dibulatkan menjadi 503.
- 6. Bahwa selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah=8.577 suara dikurangi 4.929=3.648 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait melebihi dari 2% atau melebihi ambang batas syarat formil pengajuan.
- 7. Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana dan seterusnya dianggap dibacakan.

Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Bahwa menurut Pihak Terkait, pengajuan permohonan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut.

- 1. Dan seterusnya dianggap dibacakan
- 2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kabupaten/XII/2020 tentang

Rekapitulasi Penetapan Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT atau tanggal 16 Desember 2020 pukul 11.45 WIB

- 3. Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2020, pukul 03.06 WIB via online dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) 82/PAN.MK/AP3/XII/2020.
- 4. Bahwa dengan demikian, tenggang waktu 3 hari kerja pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi terhitung sejak hari Rabu, tanggal 16 Desember, hari Kamis 17 Desember, hari Jumat 18 Desember, maka permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 paling lambat diajukan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020.
- 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Permohonan Pemohon kabur, tidak jelas.

Bahwa Pemohon ... permohonan keberatan dari Pemohon adalah kabur dan tidak jelas karena tidak konsisten dalam dalil-dalil posita permohonan Pemohon, yaitu antara lain dan seterusnya dianggap dibacakan.

Tanggapan atau bantahan atas pokok permohonan Pemohon

- Bahwa apa yang telah disampaikan Pihak Terkait pada bagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara secara mutatis mutandis merupakan jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kitannya dengan pokok perkara
- 2. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menaggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait.
- 3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 telah terselenggara sesuai prosedur dan tahapan yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan, serta mengacu kepada prinsip yang demokratis, jujur, dan adil. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang telah ditetapkan Termohon selaku penyelenggara pilkada.

4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 halaman 6 menyatakan berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut.

Perolehan suara menurut Pemohon:

- 1. Dorinus Dasinapa, perolehan suara=7.697.
- 2. Robby Wilson Rumansara=5.650.
- 3. Kristian Wanimbo=4.544.
- 4. Dr. (H.C) John Tabo=7.249.

Bahwa ... dan perolehan total suara=25.136.

Bahwa Pihak Terkait menolak perolehan suara versi Pemohon. Menyatakan Pemohon berada pada peringkat dengan perolehan suara dengan perolehan suara=7.697 suara.

Perolehan suara tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Pemohon tidak mengguraikan dari mana perolehan suara tersebut didapat. Pemohon tidak menguraikan dari TPS, kampung, dan distrik mana saja perolehan suara tersebut berasal. Dan Pemohon juga tidak menguraikan di mana saja terjadi pengurangan suara Pemohon, di mana saja terjadi penambahan suara untuk paslon lain. Maka, dengan demikian dalil Pemohon tersebut hanyalah asumsi belaka tanpa bisa dibuktikan. Oleh (...)

41. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3 menit lagi ya Pak, ya? ... 3 menit lagi Pak, ya? Dipersingkat Pak, ya?

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: BAHARUDDIN FARAWOWAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan dan seterusnya.

5. Dan seterusnya dianggapkan dibacakan sebagaimana Pihak Terkait telah membuktikan pada PT-7 sampai dengan PT-15. Petitum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mejatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. Dalam pokok perkara:

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- 2. Menyatakan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, tangal 16 Desember 2020.
- 3. Menetapkan persoalan ... perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 yang benar dan sah adalah sebagai berikut.
 - 1. Nomor Urut 1, Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos., dan Andris Paris Yosafat Maay =4.929 suara.
 - 2. Robby Wilson Rumansara, S.P., M.H., dan Lukas Jantje Puny, S.Pd=6.015 suara.
 - 3. Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti=5.615 suara. dan,
 - 4. Dr. (H.C) John Tabo, S.E., M.BA., dan Ever Mudumi, S.Sos=8.577.

Total jumlah suara sah=25.136 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

43. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih. Silakan, sekarang untuk Bawaslu untuk perkara 81/PHP.BUP-XIX/2021! Sama ya, ini sampaikan pokok-pokoknya saja, Bu, ya.

44. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: CORNELIA MAMORIBO

Izin, Yang Mulia.

45. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan!

46. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: CORNELIA MAMORIBO

Akan saya bacakan keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dengan pokok perkara perselisihan Nomor (...)

47. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Agak keras, Bu. Miknya didekatkan. Ya.

48. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: CORNELIA MAMORIBO

81/PHP.BUP-XIX/2021, Nomor dianggap dibacakan dan seterusnya. Atas Pemohon dari Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos., dan Andris Paris Yosafat Maay. Sesuai dengan kedudukan Bawaslu sebagai pemberi keterangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memberikan keterangan terkait dengan dalil-dalil permohonan Pemohon terhadap perselisihan hasil pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020. Khususnya yang menyebutkan secara tegas tugas dan kewenangan dan fungsi kelembagaan Bawaslu Kabupaten Mamberamo dalam Rava penyelenggaran tahapan Pemilihan Bupati dan kabu ... Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dan hadirin yang kami hormati. Setelah mencermati dan memahami isi permohonan Pemohon, pada dasarnya Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya melihat setidaknya ada 13 pokok permohonan yang merupakan tugas dan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya untuk memberikan keterangan terkait hal tersebut, Bawaslu Mamberamo Raya memberikan keterangan sebagai berikut.

Yang pertama. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya terkait perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Surat Keputusan Nomor 200 dan seterusnya dianggap dibacakan, pada tanggal 16 Desember 2020 sebagai berikut.

Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos., dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H., suara sah=4.929.

Nomor ... Pasangan Calon Nomor Urut 2, Robby Wilson Rumansara, S.P., M.H., dan Lukas Jantje Puny, S.Pd., perolehan suara sah=6.015.

Pasangan Calon Nomor Urut 3, Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti, perolehan suara=5.615.

Pasangan Calon Nomor Urut 4, Dr. (H.C). John Tabo, S.E., M.Mba ... MBA., dan Ever Mudumi, S.Sos., perolehan suara=8.577.

Jumlah suara sah=25.136.

Jumlah suara tidak sah=330.

Jumlah su ... suara sah dan tidak sah=25.466. Bukti PK-1.

Ba ... Kedua. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 4 angka 3 yang pada intinya adalah terdapat pengurangan suara Pemohon, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Mamberamo Tengah, dijelaskan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bahkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara D.Hasil Distik atau Kecamatan dengan hasil perolehan suara sebagai berikut, dianggap dibacakan.

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas Distrik Mambramo Hulu, dijelaskan bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara di Distrik Mamberamo Hulu, tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hanya terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 terkait dengan perolehan hasil di TPS 02 Foau yang mana saksi tersebut menyampaikan ... izin, ulang ... menyampaikan Paslon Nomor Urut 2 mendapat perolehan suara perolehan 13 Namun, setelah melakukan penyandingan data terhadap C.Hasil Salinan-KWK milik pengawas TPS dan KPPS, hasilnya adalah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 0 suara. Perolehan suara masing-masing pasangan calon Distrik Mamberamo Hulu dari masing-masing TPS adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan.
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panitia pengawas Distrik Rufaer, dijelaskan bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Di Tingkat Distrik, saksi masing-masing pasangan calon tidak menyampaikan sanggahan keberatan terhadap hasil yang telah disampaikan dan saksi menyetujui ... menyetujui hasil dengan perolehan suara sebagai berikut. Dianggap dibacakan.
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Distrik Sawai, dijelaskan bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik, terdapat keberatan dari Panwas Distrik Sawai terhadap penggunaan surat suara cadangan, sehingga terjadi kesepakatan antara PPD, saksi, dan masing-masing pasangan calon dan panwas distrik terkait permasalahan tersebut, dilanjutkan Pleno Distrik Kabupaten untuk memperoleh saran dan masukkan dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan hasil perolehan masing-masing pasangan calon di Distrik Sawai adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan. Bukti PK-5.
- 3. Bahwa terhadap pokok permohonan halaman 7 dan angka 5 yang pada intinya adalah perolehan suara permohonan ... Pemohon selisih disebabkan adanya pelanggaran adminsitrasi TSM yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak pernah menerima laporan maupun menemukan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan Pasangan Calon

- Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang terjadi di 8 distrik.
- 4. Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon halaman 5 angka 6, yang pada intinya adalah selisih perolehan suara sangat signifikan di 4 distrik yaitu, Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah Timur, Distrik Sawai dan Distrik Mamberamo Hulu. Terjadi karena secara faktual dan masif telah terjadi pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Bawaslu Mamberamo Raya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak pernah menerima laporan dugaan politik uang atau money politics yang dilaporkan oleh tim atau Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerima tiga laporan yang diberikan dari tim saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun semuanya tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil.
- 5. Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon halaman 5 angka 7 sampai dengan 9, yang pada intinya adalah KPPS dan Panwas tidak melaksanakan tugas, sehingga keberatan saksi pasangan calon tidak dimuat dalam Form Keberatan atau C keberat ... C.Kejadian Khusus. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan bahwa sebelum Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, panwas distrik telah menyerahkan dokumen kepada Bawaslu berupa D.Hasil Distrik sebanyak delapan distrik dan C.Salinan-KWK berjumlah 126 salinan.
- 6. Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon halaman 5 poin 10, yang pada intinya adalah terjadi kecurangan di Distrik Mamberamo Hulu yaitu pada distrik, pada TPS 03. KPPS, pengawas TPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, melakukan pencoblosan surat suara dan melakukan pengancaman serta melarang untuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk masuk ke TPS.

Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 03, Kampung Dabra, Distrik Mamberamo Hulu, dijelaskan bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 03 Dabra, dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hedrin Abayso, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Elies Enembe dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yakob Wanimbo. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir.

Hadir juga ketua Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya melakukan ... melakukan supervisi di 5 TPS ... 4 TPS di Distrik

Kabupaten Mamberamo Raya. Bawaslu Kabupaten Mam ... Izin, Yang Mulia, ulang. Tersebut ... di TPS tersebut ada indikasi penggunaan sistem noken, namun Ketua Bawaslu Mamberamo Raya menyampaikan kepada ketua KPPS dan anggotanya agar tidak melakukan pemungutan suara menggunakan sistem ikat. Adapun perolehan suara TPS 03 Kampung Dabra adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Pepsena I Distrik Mamberamo Hulu, dijelaskan bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 03 Kampung Papsena I dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Yulianus Beidobak, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Leo kawena dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Septerku, sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir. Adapun perolehan suara di TPS 03 Kampung Papasena 1 adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kampung Taive, Distrik Mamberamo Hulu, dijelaskan pada saat pemungutan suara di TPS 03 Taive, hanya dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4. Sedangkan saksi pasangan calon yang lainnya tidak hadir. Pemungutan suara di TPS 03 Kampung ta ... Taive berjalan dengan baik sesuai peraturan pemilihan yang berlaku. Perolehan suara di TPS 03 Kampung Taive adalah sebagai berikut dianggap dibacakan.

- 7. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon halaman 5 poin 11 yang pada intinya adalah telah terjadi manipulasi data pemilih di Distrik Mamberamo Tengah Timur, melibatkan anak-anak yang belum memiliki hak suara untuk melakukan pencoblosan. Petugas KPPS dan KPPS di seluruh TPS tidak memberikan Formulir C.Hasil-KWK kepada saksi Pemohon. Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Mamberamo Tengah Timur dijelaskan bahwa Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Di Tingkat Distrik tidak ada keberatan dari masingmasing saksi pasangan calon. Panwas Distrik Mamberamo Tengah Timur tidak pernah menerima laporan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di ... di TPS di setiap Distrik Mamberamo Tengah Timur. C.Hasil-KWK dan salinannya di semua TPS yang ada di Distrik Mamberamo Tengah Timur telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dan diberikan kepada masing-masing saksi maupun pengawas TPS, Bukti PK-10. Bahwa terhadap ...
- 8. Bahwa terhadap pokok permohonan halaman 6, poin 12 yang pada intinya adalah terjadi kecurangan dan pelanggaran pada

Distrik Mamberamo Tengah yang mana terdapat pemilih siluman terhadap manipulasi data pada Formulir D.Hasil Kecamatan. Petugas PPS dan KPPS di seluruh TPS Distrik Mamberamo Tengah tidak memberikan Formulir C.Hasil. Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan bahwa berdasarkan pengawas Panwas Distrik Mamberamo Tengah bahwa di Distrik Mamberamo Tengah terdapat 11 kampung, pembacaan hasil presentasi PPS 10 kampung berjalan aman dan lancar. Namun, terdapat masalah pada saat presentasi PPS Kampung Sawai ... izin, ralat, PPS Kampung Saswa Kwesar. C.Hasil belum diserahkan kepada saksi dan pengawas TPS, sehingga Panwas Distrik Mamberamo Tengah meminta agar C.Salinan-KWK diberikan kepada saksi dan panwas dahulu baru dilaksanakan pleno. Bahwa berdasarkan penyampaian PPS perolehan hasil tidak diisi ke dalam C.Hasil-KWK dan Salinannya, tetapi ditulis di papan tripleks. Pengawas TPS dan PPS Saswa Kwesar sudah menyampaikan saran kepada KPPS untuk mengikuti prosedur pemungutan sesuai dengan peraturan seperti tanda tangan surat suara, tetapi ternyata ketua KPPS tidak tahu baca dan tulis.

49. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Lebih ini, Bu, lebih dipersingkat, khusus yang terkait dengan kondisi-kondisi khusus atau keberatan-keberatan yang ada.

50. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: CORNELIA MAMORIBO

Siap. Terima kasih.

51. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Karena waktunya tinggal 2 menit, Ibu.

52. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: CORNELIA MAMORIBO

Siap. Jadi, pada saat Pleno di Distrik Mamberamo Tengah Timur, untuk Saswa Kwesar ... untuk kasus Saswa Kwesar sudah diselesaikan dengan dikeluarkan surat dari Bawaslu untuk kemudian ditindaklanjuti oleh KPU.

9. Bahwa mengenai pokok permohonan halaman 7 dan angka 13 pada intinya adalah terjadi kecurangan pada Distrik Rufaer yang mana telah terjadi penyerahan uang oleh ketua tim

Paslon Nomor Urut 3, terjadi pencoblosan lebih dari satu kali. Saksi pasangan calon tidak memberikan kesempatan melakukan protes dan tidak mendapat C.Hasil. Ketua tim Paslon Nomor Urut 1 mendapat ancaman. Saksi Paslon Nomor Urut 4 mencoblos satu ikat surat suara. Petugas PPS di Kampung Taiyai melakukan pencoblosan sejumlah surat suara. Salah satu anggota tim Paslon Nomor Urut 4 mengambil surat suara di TPS 03 Fona dan mencoblos untuk Paslon Nomor Urut 4.

Bahwa pada intinya terlapor atas nama Bawaslu sudah menindaklanjuti laporan dari Saudara Karlos Jikua Nomor 004, diang ... dianggap dibacakan, dengan terlapor atas nama Kristian Wanimbo, Paslon Nomor Urut 3 terkait dengan dugaan politik uang sudah diputuskan di Pengadilan Negeri Jayapura dengan tindak ... dengan pidana penjara 6 bulan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di TPS (ucapan tidak terdengar jelas), pengawas TPS tidak menemukan maupun menerima laporan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali di TPS. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan kampung Distrik Rufaer, pengawas TPS ... pengawas TPS tawai ... Taiyai, Kampung Bareri, Fona, Kampung Haya, dan pengawas Kampung Kai, maka dijelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara untuk Kampung sa ... Sikari berjumlah dianggap dibacakan, Kampung Taiyai dianggap dibacakan, Kampung Bareri dianggap dibacakan, Kampung Fona dianggap dibacakan, Kampung Haya dianggap dibacakan.

Bahwa pan ... Panwas Kampung Kai tidak mendapatkan laporan atau temuan terkait dengan ancaman kekerasan tim sukses pasangan lain pada saat pemungutan dan perhitungan suara masing-masing TPS di Kampung Kai.

Bahwa di Kampung Taiyai tidak terlihat adanya penerima laporan terkait pengambilan seikat surat suara yang dicoblos sendiri oleh pasangan calon tertentu. Bahwa pengawas TPS 03 Kampung Fona tidak melihat atau menerima laporan terkait adanya pengambilan seluruh kertas suara di TPS 03 Kampung Fona. Hasil pengawasan panwas distrik dijelaskan dan ... dengan perolehan sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

10. Bahwa mengenai permohonan Pemohon halaman 7 pada intinya adalah terjadi pelanggaran kecurangan di Distrik Sawai. Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik dijelaskan bahwa pada saat rekapitulasi ... rekapitulasi (...)

53. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kesimpulan saja langsung, Bu!

54. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: CORNELIA MAMORIBO

Siap. Bahwa ... bahwa mengenai pokok permohonan halaman 7, menerangkan bahwa Bawaslu kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 1 Desember telah menerima, sudah tadi dibacakan. Bahwa mengenai pokok permohonan, permohonan Kabupaten Bawaslu Mamberamo Raya sebelum pleno rekapitulasi suara tingkat panwas distrik telah menyerahkan delapan salinan D.Hasil dan 126 salinan C.Hasil. Bahwa mengenai pokok permohonan halaman 9, Bawaslu bedasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak pernah menerima atau menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan secara tertruktur, sistematis, dan massif.

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, yang dibuat dengan sebenarnya. Saya Cornelia Mamoribo, tanda tangan. Zaenal Sineri anggota, tanda tangan. Metu Salack Kowi anggota, tanda tangan. Demikian.

55. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Saya konfirmasi terlebih dahulu, ya. Terkait dengan waktu. Ini dari KPU nanti kalau misalnya mau dijawab langsung oleh Komisioner, silakan!

Ini terkait dengan waktu penetapan hasil rekapitulasinya coba diulangi lagi! Tanggal berapa? jam berapa? Silakan, Kuasa Hukum atau Komisionernya!

56. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Izin, Yang Mulia.

57. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

58. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Ya, dilakukan pada tanggal 16 Desember.

59. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

16 Desember.

60. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Ya, pukul ... tahun 2020. Pukul 13.45 WIT.

61. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pukul 13.45 WIB, ya. Itu diumumkan langsung atau masih ditunda? Diumumkan langsung?

62. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Diumumkan langsung, Yang Mulia.

63. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Diumumkan langsungnya di mana?

64. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Di saat setelah pleno, penetapan.

65. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Coba dari Komisioner!

66. TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS KAMBU

Izin, Yang Mulia.

67. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

68. TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS KAMBU

Pada tanggal 16 Desember 2020, pukul 13.45 WIT, di saat itu, kami membaca SK. Ditetapkan di hari itu dan kita umumkan. Karena di situ ada mik atau toa besar yang kita gan ... siapkan di luar untuk diumumkan dan hari itu juga kita tempel di papan pengumuman yang ada di kantor KPU.

69. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Langsung ditempel di papan pengumumannya?

70. TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS KAMBU

Langsung ditempel (...)

71. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Semuanya, ya (...)

72. TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS KAMBU

Di kantor KPU di papan pengumuman. Dan kami ba ... berikan juga kepada saksi yang hadir pada saat itu semua. Walaupun, saksi ada yang tidak datang, tapi kami berikan semua dan diumumkan saat itu.

73. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pakai toa, ya, semua?

74. TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS KAMBU

Pakai toa 2 besar. Besar sekali.

75. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oke.

76. TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS KAMBU

Radius 500 meter itu dengar.

77. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ya. Kemudian, website-nya sudah ... masuk juga di dalam website-nya ?

78. TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS KAMBU

Ya.

79. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Masuk dalam website-nya hari apa itu?

80. TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS KAMBU

Kami di Memberamo Raya tidak ada jaringan jadi tidak ada website. Jadi, kita umumkan secara manual.

81. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Luas, ya?

82. TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS KAMBU

Ya.

83. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Toa itu, ya.

84. TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS KAMBU

Kalau ada ... kalau ada internet, pasti kami umumkan di website.

85. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Kemudian, terkait tadi dengan keberatannya dari dalil Pemohon 8 distrik. Berapa distrik yang ada di Memberamo Raya itu?

86. TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS KAMBU

8 distrik.

87. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

delapan distrik itu, ya. Semuanya, yang terkait dengan surat keberatan atau kondisi khusus ada enggak pengisian di situ? Dari mulai TPS? Buktinya ada, enggak? Tadikan dari Bawaslu enggak ada, Bu, ya, keberatan, ya?

88. TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS KAMBU

Ya, tidak ada keberatan.

89. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sama sekali tidak ada keberatan?

90. TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS KAMBU

Ya, tidak ada keberatan. Kalau ada keberatan, berarti diisi D.Hasil. Tapi, tidak ada.

91. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kondisi khusus juga tidak ada?

92. TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS KAMBU

Tidak ada.

93. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terkait dengan itu. Kalau bukti PT dari ini ya ... sekarang dari Pihak Terkait. Ini bukti PT-7, PT-8, sampai PT-15 itu bukti apa itu? C-

KWK atau apa itu? Tidak disebutkan tadi, ya. Bukti ... hanya bukti PT-7 dan seterusnya. Itu bukti apa? Berupa apa itu?

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: BAHARUDDIN FARAWOWAN

Ya, Yang Mulia. Bahwa Bukti D.Hasil.

95. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

D.Hasil?

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: BAHARUDDIN FARAWOWAN

Ya. PT-7 dan seterusnya.

97. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Apa itu? Buktinya apa? C-KWK atau apa itu?

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: BAHARUDDIN FARAWOWAN

D.Hasil ... Hasil tingkat kecamatan.

99. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

D.Hasil kecamatan?

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: BAHARUDDIN FARAWOWAN

Ya.

101. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, yang terkait politik uang itu, hasilnya dari bukti yang menunjukkan hasil masing-masing pasangan calon berapa itu? Yang ada politik uang yang tadi, yang kemudian sudah dijatuhkan putusan enam bulan tadi? Ada, enggak dari KPU? Berapa hasilnya di sini? Itu di ... di distrik mana itu? Yang tadi sudah diputus tadi, enam bulan itu?

102. TERMOHON PERKRA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS KAMBU

Izin ... izin, Yang Mulia. Itu kami tidak tahu. Kalau tanyakan kepada Bawaslu, bisa.

103. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ya. Bawaslu, ini gimana ini, Bawaslu? Kejadiannya di mana ini?

104. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: ZAENAL SINERI

Izin, Yang Mulia.

105. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

106. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: ZAENAL SINERI

Kami dari Bawaslu.

107. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

108. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: ZAENAL SINERI

Terkait dengan politik uang, ini sebelum pungut hitung, Bu.

109. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, sebelum pungut hitung?

110. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: ZAENAL SINERI

Ya.

111. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oke. Ya. Kemudian (...)

112. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: ZAENAL SINERI

Terima kasih.

113. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih.

Itu yang terkait dengan hasil 0, itu, Bu, tadi Ibu sampaikan ada termasuk Bawaslu, ya ... termasuk KPU, silakan jawab nanti. Itu kan ada tadi yang hasilnya 151 untuk John Tabo, ya. Itu menggunakan apa? Cobloskan semua? Tidak ada yang pakai ikat kan?

114. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: CORNELIA MAMORIBO

Izin, Yang Mulia. Tidak.

115. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada? Semua coblos semua ya?

116. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: CORNELIA MAMORIBO

Siap.

117. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, terima kasih.

118. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, berikutnya, pengesahan alat bukti untuk Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021. Termohon mengajukan T-1 sampai dengan T-26, benar? Termohon, benar?

119. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Ya, Yang Mulia.

120. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait mengajukan PT-1 sampai dengan PT-15, benar?

121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: BAHARUDDIN FARAWOWAN

Benar, Yang Mulia.

122. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Bawaslu. Mengajukan PK-1 sampai dengan PK-12, benar?

123. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: CORNELIA MAMORIBO

Siap, benar, Yang Mulia.

124. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya, lanjut ke Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021. Silakan, Yang Mulia.

125. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Ini karena Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021, juga di Mamberamo Raya, ya, yang diajukan oleh Paslon ... sebentar, saya cek dulu, ya. Ini Paslon Nomor Urut 02, ya. Saya kira karena tadi ini sudah dibacakan juga oleh Termohon yang bahwa pokok-pokoknya nanti kalau misalnya sama tidak perlu diulangi lagi ya? Begitu ya? Biar kita bisa efektif waktunya untuk lebih mendalami perkara ini, ya. Silakan kepada Termohon untuk Perkara 72/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

126. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: HELMI

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jawaban Termohon kepada perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Nomor Urut 2 atas nama Robby Wilson Rumansara, S.P., M.H dan Lukas Yance P. Maay, S.Pd.

- I. Dalam eksepsi. Mengenai ...
 - 1.1. Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.
 - 1.2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.

 Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 dalam Perkara Nomor 72 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut.
 - 1. Poin 1. Dianggap dibacakan.
 - 2. Juga dianggap dibacakan.
 - 3. Bahwa berdasarkan data agregat kependudukan perkecamatan di angka 2 Kabupaten Mamberamo Raya sesuai surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 470 dan seterusnya, tertanggal 23 Desember 2020 Kabupaten Mamberamo Raya memiliki jumlah penduduk, yaitu 38.203 jiwa. Perolehan suara.
 - 4. Mohon maaf, Yang Mulia. 4.3. perolehan suara adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2, Robby Wilson Rumansara, S.P., M.H., dan Lukas Jantje Puny, S.Pd., memperoleh suara sebanyak=6.000 ... 6.015 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. (H.C) John Tabo, S.E., M.BA., dan Ever Mudumi, S.Sos., memperoleh suara sebanyak=8.577 suara.
 - 4.4. Perolehan suara sah sebanyak 25.136 suara, sehingga 2% dari perolehan suara sah adalah sebanyak 502,072 suara atau dibulatkan=502 suara. Adapun selisih persuara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan penetapan yang dikeluarkan Termohon adalah sebesar 2.562 suara atau 10,19%.

4.6. Maka permohonan Pemohon tidak memenuhi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) dan seterusnya.

Poin kelima, poin keenam. Poin tujuh, delapan, 9 dan seterusnya dianggap dibacakan.

- 1.3 Tenggang waktu pengajuan permohonan.
 - 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (...)

127. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dan seterusnya saja.

128. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: HELMI

Dan seterusnya.

- Bahwa Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember, pukul 13.45 WIT melalui rapat pleno secara terbuka yangdihadiri saksi pasangan calon. Dengan demikian, tenggang waktu 3 hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 16 Desember 2020, 17 Desember 2020, dan 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB.
- 4. Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Desember 2020, pukul 00.26 sesuai akta pengajuan permohonan nomor 73 dan seterusnya.
- 5. Bahwa jadwal rekapitulasi dan penetapan penghitungan suara tingkat kabupaten dilakukan oleh Termohon berdasarkan PKPU dan seterus ... PKPU Nomor 5 Tahun 2020 dan seterusnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 dan seterusnya. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan segala kerendahan hati Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan dalam Perkara Nomor 72 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

- 1.4 Permohonan Pemohon tidak jelas.
 - 1. Bahwa sesuai denganketentuan Pasal 8 ayat (3).

129. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan saja.

130. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: HELMI

Dianggap dibacakan.

- 2. Bahwa dalam posita halaman 6 angka 2 Pemohon mendalilkan mendapatkan suara sebanyak 6.108 dan Pihak Terkait mendapatkan suara sebanyak 8.386 suara. Namun Pemohon dalam petitumnya pada halaman 16 angka 3 menjelaskan telah mendapatkan suara sebanyak=7.555 suara. Hal ini menunjukkan kekeliruan Pemohon dalam mendalilkan permohonannya karena faktanya jika mencermati keseluruhan isi posita Pemohon tidak mampu menguraikan dengan konkret berapa perolehan suara yang pasti dari Pemohon yang dikurangi akibat pelanggaran yang juga dilakukan oleh Termohon.
- 3. Dianggap dibacakan.
- II. Dalam pokok permohonan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara menurut Termohon adalah sebagai berikut.

- 1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Termohon.
- 2. Sampai dengan 7 dianggap dibacakan.
- 8. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut.

Pasangan Calon Nomor urut 1 Dorinus Dasinapa AKS., S.Sos—Andris Paris Yosafat Maay (...)

131. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sama kan tadi, ya?

132. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81 /PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: HELMI

Ya sama, Yang Mulia.

133. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya lanjut saja.

134. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81 /PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: HELMI

Ya dianggap dibacakan.

9. Bahwa berdasarkan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah=6015 atau 23,93% atau berada di peringkat 2 peroleh ... perolehan suara dari 4 pasangan calon.

Yang Mulia, poin ke-10 sampai dengan ke-15 dianggap dibacakan.

135. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya lanjut.

136. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81 /PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: HELMI

Poin ke-16. bahwa dalil-dalil Pemohon pada angka 4 poin b pada pokok permohonan Pemohon tidak berdasar karena Pemohon tidak mampu menunjukkan perolehan suara Pemohon menurut versi Pemohon secara rinci dapat Termohon jelaskan dan seterusnya itu dianggap dibacakan, Yang Mulia.

137. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

138. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81 /PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: HELMI

Poin ke-17. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 huruf b pada pokok permohonannya terkait pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan diduga dilakukan oleh Termohon merupakan dugaan yang bersifat asumsi dan tidak berdasar. Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya setelah menyiapkan kronologis dan Berita Acara. Adapun terkait rekomendasi Bawaslu Mamberamo Raya Termohon telah mengeluarkan SK sebanyak 3 sebagai berikut dianggap dibacakan, Yang Mulia.

139. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

140. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81 /PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: HELMI

- 18. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 dan 6 dalam pokok permohonannya adalah tidak benar dan bersifat asumsi karena Pemohon tidak menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, di mana, dan kapan dilakukan, serta bagaimana cara melakukannya, dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon. Selain itu, Termohon tidak menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan dugaan kecurangan dan pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon.
- 19. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonannya secara keseluruhan tidak dapat menguraikan perbedaan perolehan suara yang mempengarhi terpilihnya pasangan calon antara versi Pemohon dan Termohon yang didasarkan pada sumber data yang valid, melainkan pemo ... permohonan Pemohon hampir keseluruhannya hanya menguraikan dugaan-dugaan pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu, dan sejauh ini Termohon hanya menerima 3 rekomendasi dari Bawaslu. Pada prinsipnya, Termohon akan menindaklanjuti setiap pelanggaran apabila pelanggaran tersebut kemudian direkomendasi oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
- 20. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon dalil permohonan yang disampaikan Pemohon pada pokoknya

secara keseluruhan, pada prinsipnya tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf b poin ke-4, PMK Nomor 6, dan seterusnya dianggap dibacakan.

III. Petitum

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara:

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan benar dan teteap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200 dan seterusnya
- 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 yang benar menurut Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200 dan seterusnya.

Pasangan Nomor 1, Dorinus Dasinapa AKS., S.Sos., dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H., memperoleh suara=4.929 suara.

Pasangan Calon Nomor Urut 2, Robby Wilson Rumansara, S.P., M.H., dan Lukas Jantje Puny S.Pd., memperoleh=6.015 suara

Pasangan Calon Nomor Urut 3, Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti memperoleh suara=5.615 suara

Pasangan Calon Nomor Urut 4, Dr. (H.C) John Tabo, SE., MBA., dan Ever Mudumi, S.Sos., memperoleh=8.577 suara

Dan jumlah suara sah sebanyak = 25.236 suara

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Latifah Anum Siregar SH. MH., Helmi SH., Wehelmina Morin SH., terima kasih, Yang Mulia.

141. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya terima kasih. Sekarang kepada Pihak Terkait juga sama, ya? Kalau tadi sudah dijelaskan, tidak perlu diulangi, ya? Yang lainnya sebagai bentu penegasan yang belum dijelaskan, silakan!

142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81 /PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: ELIEZER MURAFER

Baik, Yang Mulia. terima kasih atas waktu yang diberikan. Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021.

Dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. bahwa menurut Pihak Terkait Pemohon ... Pemohon tidak memiliki ... memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perselisihan permo ... perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya. Bahwa berdasarkan data kependudukan direktorat jenderal kependudukan dan seterusnya, bahwa jumlah penduduk Kabupaten Mamberamo Raya adalah sebanyak=38.203 jiwa. Berdasarkan ... sehingga, berdasarkan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perse ... per ... untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya ke Mahkamah Konstitusi, selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak melebihi daripada 2% total suara sah seluruh perolehan suara pasangan calon berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Mamberamo Raya.

Bahwa berdasarkan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon, total suara sah yaitu 25.136 suara adalah sama dengan 5,2 ... 502,72 ... 72 suara atau dibulatkan menjadi 503 suara. Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon yaitu 8.577 dikurang 6.015 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebesar=2.562. Sehingga selisih perolehan suara tersebut antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi 2% atau melebihi ambang batas syarat formil pengajuan permohonan. Dengan demikian maka permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Tenggang waktu pengajuan permohonan. Bahwa menurut Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 (...)

143. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dan seterusnya.

144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: ELIEZER MURAFER

Dan seterusnya. Bahwa objek se ... objek se ... diajukan (...)

145. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini sama ya, tadi, ya. (...)

146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: ELIEZER MURAFER

Siap (...)

147. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jamnya juga sama, ya.

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: ELIEZER MURAFER

Siap, Yang Mulia.

149. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Langsung saja ke yang ... ini saja, yang 3. Angka 3-nya.

150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: ELIEZER MURAFER

Angka 3-nya. Siap, Yang Mulia. Bahwa objek sengketa diumumkan oleh Pemohon pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIB, maka 3 hari tenggang waktu bagi Pemohon untuk mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi yaitu sejak hari Rabu tanggal 16 Desember, hari Kamis tanggal 17 Desember, dan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020.

Bahwa faktanya Pemohon mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 00.26 WIB via online dengan nomor atau pengajuan permohonan AP3 dan seterusnya. Dengan demikian maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang telah diatur dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020. Sehingga permo ... permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan ... pengajuan perbaikan dan kelengkapan permohonan dianggap dibacakan.

Menarik Bawaslu sebagai Pihak Terkait dalam permohonan, dianggap dibacakan.

Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, dianggap dibacakan. Tanggapan atas pokok perkara permohonan Pemohon.

- a. Pendahuluan, dianggap dibacakan.
- b. Tanggapan atau bantahan atas dalil Pemohon.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah dalil yang sangat mengada-ada dan hanya berasumsikan semata dari Pemohon saja karena Pemohon tidak bisa menjelaskan secara jelas dan lengkap siapa ... siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, dimana dilakukan pelanggaran tersebut, kapan terjadinya pelanggaran tersebut, pelanggaran seperti apa yang telah dilakukan. Faktanya pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 di Kabupaten Mamberamo Raya berjalan secara aman dan lancar.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi money politics di TPS 01 Kampung Anggreso, Kelurahan Distrik Mamberamo Tengah perlu kami te ... tegaskan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor urut ... Urut 3 Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Kabupaten Mamberamo Raya, bukan Pihak Terkait. Dan kejadian tersebut terjadi pada saat proses kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 berlangsung bukan pada saat pada tanggal ... bukan pada tanggal 9 Desember 2020 sehingga sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara dari Pihak Terkait maupun Pemohon.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya ter ... kejadian di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08 dan TPS 09 Kasonaweja, menurut kami bahwa dalil tersebut hanyalah merupakan asumsi belaka karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci bahwa siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, bagaimana pelanggaran tersebut dilaksanakan, dan apa ... dan berapa jumlah suara Pemohon yang telah di ... dihilangkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut dan berikut terkait dengan dalil Pemohon yang telah menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 04 Burmeso, TPS 05 dan 06 Burmeso, TPS 01 Saswa Kwesar, TPS 01 Ery, TPS 01 Sikari, TPS 03 Dabra, TPS 01, TPS 02, dan 03 Taive. Menurut Pihak Terkait bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada karena tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Bahwa selama proses pemilihan dan rekapan ... rekap hasil perolehan suara secara berjenjang dilakukan baik di TPS tingkat distrik, Pleno penetapan hasil yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan. Bahkan menandatangani formulir model C.Hasil Salinan-KWK di tingkat TPS dan/atau formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di tingkat kelurahan. Sebagaimana bukti PT-6 sampai PT ... PT-26.

Bahwa ber ... bahwa keberatan baru saja diajukan oleh saksi Pemohon sesaat setelah Termohon selesai melakukan rekapitu ... rekapitulasi tingkat kabupaten yang menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon pemenang yang memperoleh suara terbanyak. Dengan demikian, maka dengan tepat dan benar Termohon menetapkan jumlah perolehan suara Pihak Terkait yaitu 8.570 suara dan Pemohon adalah 6.015 suara.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara.

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan benar dan sah keputusan Mahkamah Konstitusi ... Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 2000 dan seterusnya.
- 3. Menyatakan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 yang benar dan sah adalah sebagai berikut.

Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos., dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H.,=4.929 suara.

Nomor Urut 2 Robby Wilson Rumansara, S.P, M.H., dan Lukas Jantje Puny, S.E ... Jantje Puny, S.Pd.,=6.015 suara.

Pasangan Nomor Urut 3, Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti=5.615 suara.

Pasangan Nomor Urut 4, Dr. (H.C) Jhon Tabo, S.E., M.BA., dan Ever Mudumi, S.Sos.,=8.577 suara.

Total suara sah=25.136 suara.

Demikian, hormat kami, Yang Mulia.

151. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Sekarang giliran Bawaslu, ya, seperti tadi. Tolong sampaikan pokok-pokoknya, Pak, ya. Kalau yang sama tidak perlu diulangi lagi. Silakan, Pak! Sekitar 10 menit.

152. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: ZAENAL SINERI

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom.

153. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Waalaikumsalam wr. wb.

154. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: ZAENAL SINERI

Salam sejahtera untuk kita semua. Bawaslu memberikan keterangan terkait dengan Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021 dibacakan tahun 2021.

Kedudukan Bawaslu telah dibacakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dan hadirin yang kami hormati. Setelah mencermati dan memahami isi permohonan, Pemohon pada dasarnya Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya melihat setidaknya pokok permohonan yang merupakan tugas dan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya. Untuk memberikan keterangan terkait hal tersebut Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa terhadap pokok permohonan, Pemohon pada angka IV.1 yang pada pokoknya terkait penetapan perolehan surat ... terkait ... sori, maaf, maaf, Yang Mulia.

155. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

156. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: ZAENAL SINERI

Terkait penetapan perolehan suara oleh Pemohon berdasarkan pokok permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya memberikan keterangan sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

- 2. Dianggap dibacakan, a, b, dan c.
- 3. Bahwa terdapat pokok permohonan Pemohon pada angka IV.3 yang pada pokoknya menyebutkan Termohon tidak memberikan salinan C.Hasil kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan sebagai berikut.
 - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya mendapatkan salinan C.Hasil berjumlah 126 dari ... dari 126 TPS yang berasal dari masing-masing panwas distrik.
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerima Laporan Nomor 005 LP/PB-Kab/3. ... Nomor 005 LP/PB-Kab/33.15 telah dibacakan, pada tanggal 11 Desember 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan menggunakan ... dengan menu ... mengundang pelapor, saksi, dan terlapor, tetapi tidak datang. Sehingga Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya

mengeluarkan status laporan menyertakan Laporan Nomor 005 dan seterusnya tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil. PK-6 ... PK-4 terlampir, Yang Mulia.

- 4. Terdapat pokok permohonan Pemohon pada angka IV.1 huruf a dan huruf b pada Distrik Mamberamo Tengah, Distrik Mamberamo Tengah Timur, Distrik Rufaer, dan Distrik Mamberamo Hulu, yang pada pokoknya menyebutkan adanya kecurangan-kecurangan Pihak Terkait 1 dan Pihak Terkait 2 secara terstruktur, sistematis dan fasif ... massif, berdasarkan dalil permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sebagai berikut.
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di delapan TPS ... di TPS 8, TPS 9 Kampung Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus. PK-5 terlampir.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Mamberamo Tengah, pada pelaksanaan rekapitulasi repu perolehan suara di tingkat distrik. TPS ... TPS 1 Kampung Anggreso dianggap dibacakan, TPS 1 Kampung Kasonaweja dianggap dibacakan. TPS 4 Kampung Kasonaweja dianggap dibacakan. TPS 6 Kampung Kasonaweja ... maaf, Yang Mulia, TPS 5 dan TPS 6 Kampung Kasonaweja dianggap dibacakan. TPS 7 Kampung Kasonaweja dianggap dibacakan. TPS 8 Kasonaweja, TPS 9 Kampung Kasonaweja dianggap dibacakan. TPS 4 ... TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Burmeso dianggap dibacakan. TPS 1 Kampung Saswa Kwesar dianggap dibacakan.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas TPS 01 c. Kampung Anggreso, Distrik Mamberamo Tengah dijelaskan bahwa proses pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 19 ... 9 Desember 2020 tidak dapat dilakukan, sehingga suara karer ... suara kare ... maaf, tidak dapat dilakukan perhitungan suara ribut dan melakukan masyarakat penahanan kotak suara, serta menge ... mengejar ketua dan anggota KPPS atas nama Kostan Sineri.

Bahwa ... bahwa kotak suara dapat di ... diambil kembali pada sore hari sekitar pukul 16.30 WIT oleh kepala Distrik Mamberamo Tengah dan sekretaris Kampung Anggreso. Kemudian, kotak suara di ... diamankan di sekre ... di Sekretariat PPD Mamberamo Tengah.

Bahwa terkait hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan Nomor 197, dianggap dibacakan, tertanggal 9 Desember 2019 ... maaf 2020. Yang pada intinya meminta kepada agar KPU Kabupaten Mamberamo Raya segera memerintahkan KPPS 01 Kampung Anggreso me ... melaksanakan perhitungan suara pada TPS Kampung Anggreso karena perhitungan suara TPS 01 Kampung Anggreso belum dilakukan karena terjadi keributan. Dan KPU Kabupaten Mamberamo Raya menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Hal perolehan suara telah dibacakan ... dianggap dibacakan. Bukti PK-7 terlampir.

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kampung Kasonaweja dijelaskan pengawas TPS 01 Kasonaweja menemukan 2 C Pemberitahuan yang akan digunakan oleh orang lain, namun pengawas TPS mencegah dan ... menyita dan mencegah ... mencegah dan menyita C.Pemberitahuan tersebut. Pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan baik hingga Perolehan perhitungan suara. hasil suara telah dibacakan ... dianggap dibacakan. Maaf, Yang Mulia.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan penga e. pengawas TPS 02 Kampung Kasonaweja dijelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah dilaksanakan dengan baik dihadiri oleh masing-masing saksi pasangan calon. Pengawas TPS 02 Kasonaweja menemukan C Pemberitahuan yang akan digunakan oleh orang lain, namun pengawas TPS dan saksi pasangan ... Paslon Nomor 02 mencegah dan menyita C.Pemberitahuan tersebut. Hasil perolehan suara masing-masing sebagai berikut. Telah dibacakan ... telah dianggap dibacakan, Bukti PK-9 terlampir.
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kampung Kasonaweja dijelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah dilaksanakan dengan baik dihadiri oleh masing-masing saksi pasangan calon, pasang ... Panwas TPS 02 Kampung Kasonaweja menemukan C.Pemberitahuan yang akan digunakan oleh orang lain. Namun, pengawas TPS mencegah dan menyita C.Pemberitahuan tersebut.

Hasil perolehan suara masing-masing TPS dianggap dibacakan, Bukti PK-10 terlampir, Yang Mulia.

g. G ... g, h, i, dan j, dianggap dibacakan.

157. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, langsung kesimpulan saja, kesimpulannya?

158. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: ZAENAL SINERI

Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan kabu ... menerangkan ... kabupaten ... Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal lima ... lima ... 15 Desember 2020 telah menerima laporan dengan Nomor 005, telah dibacakan. Tentang dugaan tindak pidana pemilihan, dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 02. Terhadap laporan tersebut, tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formil, materiil. Bukti terlampir PK-4, vide.

Bahwa, anggota Bawaslu Provinsi Papua, atas nama Niko Tunjanan Koordinator Divisi Pengawasan, berangkat ke Kabupaten Mamberamo Raya yang dalam rangka melakukan supervisi. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Mamberamo Raya.

Berdasarkan surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 501, dianggap dibacakan, tertanggal 13 Desember 2020, PK-27. Bahwa, pada tanggal 14 Desember 2020, Anggota Bawaslu Provinsi Papua Niko Tunjanan di ... di ... didatangi oleh massa salah satu pasangan calon di penginapan yang dit ... ditempati oleh Niko Tunjanan menginap. Anggota Bawaslu Provinsi Papua tersebut agar segera meninggalkan Kabupaten Mamberamo Raya, tanpa alasan dan yang jelas pada tanggal 15 Desember 2020. Anggota Bawaslu Provinsi Papua Niko Tunjanan meninggalkan Kabupaten Mamberamo Raya.

159. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

160. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: ZAENAL SINERI

B. Keterangan tambahan.

161. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan saja, ya!

162. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: ZAENAL SINERI

Ya. Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan ter ... tertulis ini telah disetejui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Mamberamo ... Mamberamo Raya. Cornellia Mamoribo, Ketua Zaenal Sineri, S.H., Anggota Metu Salack Kowi, S.E., anggota. Terima kasih, Yang Mulia.

163. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, Terima kasih. Saya perlu klarifikasi ke Termohon, KPU. Kalau soal waktu tadi sudah ya. Ini yang terkait dengan rekomendasi. Ini rekomendasi halaman 23, ya. Itu Sasak Wesak atau ... 24, halaman 24. Sasas Wesar, itu? Itu tulisannya yang benar mana itu? Di kolom pertama, angka 3, halaman 24. Sasak Wesar, ya? Betul?

164. TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS KAMBU

Saswa Kwesar (...)

165. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sasak Wesar?

166. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Yang Mulia.

167. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukan Saswa Kwesar, bukan, ya? Yang betul yang mana?

168. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Izin, Yang Mulia. Saswa Kwesar.

169. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oo .. Saksak

170. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Saswa.

171. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Wesar?

172. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Ya.

173. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oo, Saswa Kwesar?

174. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Ya.

175. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang mau saya tanyakan adalah untuk angka 2 nya, ya. Itu yang dilakukan adalah pemilihan ulang atau pemilihan suara ulang ini? Ditindak lanjut oleh Termohon, di kolom keempat, angka 2. Kalau yang di angka 1 itu kan adalah tindak lanjutnya penghitungan surat suara TPS sa ... TPS 01 Kampung Anggreso, ya. Kalau yang di ini ... di TPS 01 Kampung Yoke Distrik ini dilakukan apa?

176. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Pemilih ... Pemilihan suara ulang.

177. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pemilihan suara ulang?

178. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Ya.

179. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pemilihan suara ulang itu apa yang dilakukan?

180. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Dimulai dengan ... apa ... dengan (...)

181. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pemilihan ulang?

182. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Pemilihan suara ulang.

183. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pemilihan suara ulang?

184. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Ya, pemilihan suara ulang.

185. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Betul, KPU? Coba, dijawab. Yang angka 2. Apa yang dilakukan di situ? Dengan tindak lanjut itu?

186. TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: DIANA D. SIMBIAK

Izin, Yang Mulia.

187. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini PSU maksudnya?

188. TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: DIANA D. SIMBIAK

TPS Yoke itu adalah ... bedasarkan rekom yang disampaikan kepada kami adalah PSU. Jadi kami melakukan (...)

189. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang diulang adalah?

190. TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: DIANA D. SIMBIAK

PSU.

191. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pemungutan suara ulang?

192. TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: DIANA D. SIMBIAK

Ya.

193. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pemungutan suara ulang di situ, ya?

194. TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: DIANA D. SIMBIAK

Ya, ya.

195. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pemungutan suara ulang, ya. Ada buktinya, hasil sebelumnya dan setelah PSU?

196. TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: DIANA D. SIMBIAK

Ada.

197. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada. Itu T-39 itu menunjukkan semuanya, ya? Di T-39?

198. TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: DIANA D. SIMBIAK

Ya.

199. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, saya kira itu. Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan.

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: COSMAS REFRA

Izin, Yang Mulia.

201. KETUA: ANWAR USMAN

Se ... sebentar, sebentar, ya. Ya, masih ada dari, Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia Pak Wahid.

202. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, ini untuk klarifikasi, ya, ke Termohon dan juga KPU kan dan Bawaslu. Ini disinggung tadi dan juga di dalil Pemohon terkait dengan pengawasan TPS 01 Kampung Anggreso ya, Distrik Mamberamo Tengah, ya.

Itu Pemohon mendalilkan bahwa memang terjadi kericuhan di sana, ya. Karena salah satu kandidat Nomor Urut 03 menjanjikan uang untuk memberikan sejumlah uang kepada beberapa warga yang mempunyai hak pilih. Namun, setelah suara diberikan, pihak pasangan calon nomor urut tersebut tidak memenuhi janjinya sehingga terjadi

kemarahan dan terjadi penyerangan kepada petugas, sehingga seorang anggota Brimob itu terkena anak panah, ya. Betul, ya?

Nah, kemudian disebutkan oleh ... apa ... Bawaslu bahwa pemungutan suara itu dilaksanakan pada tanggal 9 Desember, pukul 08.00 WIT berakhir pukul 09.45 WIT. Itu berapa jumlah pemilih di sana itu? Sehingga kok cepat sekali atau karena terjadi keributan itu, sehingga hanya tidak sampai 2 jam pelaksanaannya? Kan semuanya kan diatur sampai pukul 13.00 WIT kan? Mengapa pukul 09.45 WIT? Di sini alasannya karena sudah tidak ada lagi orang yang datang memilih? Ini karena keributan itu atau memang jumlah pemilihnya memang ... apa ... tidak memerlukan waktu yang sampai pukul 13.00 WIT. Padahal kad ... kad ... andaipun tidak datang kan itu sampai ditunggu sampai pukul 13.00 WIT kan? Kan itu sampai dengan tang ... pukul 13.00 WIT kan? Dengan alasan apa misalnya dikatakan bahwa sudah ada yang datang lagi begitu. Ya kan di ... apa ... KPU-nya?

203. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Izin, Yang Mulia. Itu karena terjadi keributan tadi ada pemanah satu anggota Brimob dipanah, maka karena itu di ... dihentikan pada saat itu, Yang Mulia.

204. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi artinya pemanahan itu terjadi sebelum pukul 09.45 WIT itu?

205. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Ya, pada saat pemungutan suara itu terjadi, Yang Mulia. Peristiwa itu terjadi.

206. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, di jam-jam awal itu, ya?

207. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Ya. Betul ... benar.

208. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nah, lalu dihentikan? Tapi kemudian diteruskan lagi karena kotak suara itu diambil?

209. TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS KAMBU

Izin, Yang Mulia?

210. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dari mana ini?

211. TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS KAMBU

Dari Termohon, dari Termohon.

212. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Termohon. Ya, ya, silakan.

213. TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS KAMBU

Izin, Yang Mulia. Untuk proses pemungutan di TPS sini dari pukul 09 ... pukul 08.00 WIT ... dari jam pagi sudah berlangsung sampai pada waktu yang ditentukan. Proses itu sudah berlangsung, pemungutan itu sudah selesai. Pada saat itu selesai dan terjadi konflik saat itu, sehingga KPPS membawa dokumen yang sudah ada dalam kotak suara ini karena mereka berusaha untuk mengambil kotak ini pergi. Sehingga pada saat itu kepolisian berusaha untuk mengambil kotak ini, tetapi tidak bisa karena terjadi penm ... apa ... apa ... penembakan atau panah kepada salah satu brimob, sehingga massa pada posisi itu sangat ... sangat dilematis sekali. Sehingga kotak ini pihak yang bertikai itu bawa kotak pergi, setelah itu kepala distrik atau kepala camat kalau di ... di camat. Ambil kotak itu untuk bawa kembali. Setelah itu baru di tempat ... ditaruh di distrik, setelah itu baru dihitung ... hitung ulang. Untuk pemungutan sudah selesai.

214. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Memang berapa jumlah pemilih di sana? Di distrik TPS 01 itu?

215. TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS KAMBU

Izin, Yang Mulia ini yang saya 85 DPT kita di sana, di TPS yang tersebut tadi.

216. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ada 85? Ya (...)

217. TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS KAMBU

82, 82. Izin, Yang Mulia, 82. 82 pemilih yang ada di TPS tersebut. Cuma proses itu sudah berlangsung sudah selesai.

218. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Semuanya melaksanakan hak pilihnya?

219. TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS KAMBU

Ya. Semuanya sudah melaksanakan hak pilihnya selesai, setelah terjadi perebuatan kotak itu sehingga prosesnya ada komunikasi dari pihak pemerintah atau camat setempat untuk mengambil kotak yang dari tadinya pihak ini bawa ke dalam di ... ya, jarak jauh mereka bawa kembali. Setelah itu baru rekomendasi Bawaslu untuk dihitung kembali, sehingga terjadi penembakan untuk yang salah satu brimob itu.

220. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dan kalau dari dalilnya Pemohon penyebabnya ini ada memang yang menjanjikan uang?

221. TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS KAMBU

Ini yang kita tidak tahu, Yang Mulia. Kami penyelenggara tidak tahu proses itu.

222. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tidak diproses begitu ke Bawaslu hal itu?

223. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: CORNELIA MAMORIBO

Izin, Yang Mulia, tidak. Proses yang terjadi keributan itu telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan mengeluarkan ... izin, Yang Mulia. Berkaitan dengan itu telah dikeluarkan Surat oleh Bawaslu Nomor 157 untuk dilakukan pemungutan ... eh, perhitungan suara di distrik terkait dengan keributan yang dilakukan.

Jadi, pada intinya proses pelaksanaan pemungutan telah dilakukan. Pada saat setelah baru ada keributan di TPS yang bersangkutan. Dipertegas lagi bahwa jumlah pemilih adalah sebanyak 82 pemilih. Mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Prof. Kowi, silakan.

224. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: METU KOWI

Ya, izin, Yang Mulia. Jadi proses yang terjadi di Saswa Kwesar itu adalah proses ... (ucapan tidak terdengar jelas) di Kampung Anggreso itu proses pemungutan suaranya sudah selesai. Jadi, setelah proses pemungutan su ... suara selesai oleh 85 pemilih ... 82 pemilih itu ada orang mabuk yang masuk ke TPS dan bikin keributan.

Nah, sehingga kotak suara itu dirampas oleh orang yang ribut itu. Pada saat itu memang situasi tidak bisa diatasi, sehingga petugas KPPS maupun pengawas TPS kita itu mengamankan diri ke Kasonaweja, ke Distrik. Sehingga, pada saat itu juga aparat keamanan brimob masuk untuk mengambil kotak suara, tapi tidak bisa juga. Salah satu anggotanya kena panah dan mereka kembali. Setelah itu, dilakukan pendekatan persuasif oleh kepala distrik dan Sekretaris Kampung Anggreso, setelah itu mereka mengambil kotak suara kembali. Berdasarkan laporan hasil pengawasan dari pengawas TPS kita, maka kita keluarkan rekomendasi untuk penghitungan suara ulang di distrik. Demikian, Pimpinan ... Yang Mulia.

225. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Setelah ... setelah di penghitungan suara ulang, itu dihadiri oleh saksi pasangan calon semua?

226. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: METU KOWI

Itu diha ... dihadiri oleh 4 saksi dari 4 pasangan calon, Pimpinan (...)

227. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini kan calonnya ada 4, ya?

228. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: METU KOWI

Siap.

229. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, tidak ada yang keberatan dari saksi paslon itu?

230. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: METU KOWI

Tidak ada yang keberatan.

231. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sampai terakhir juga tidak ada keberatan?

232. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: METU KOWI

Tidak ada keberatan.

233. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, terima kasih.

234. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: METU KOWI

terima kasih, Yang Mulia.

235. KETUA: ANWAR USMAN

Ya baik. Selanjutnya pengesahan alat bukti.

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: COSMAS REFRA

Izin, Yang Mulia.

237. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya. Pemohon tadi, silakan!

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: COSMAS REFRA

Pemohon (...)

239. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Apa yang mau disampaikan, Pak?

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: COSMAS REFRA

Yang Mulia, ingin kami klarifikasi soal waktu pengajuan permohonan.

241. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Begini, Anda klarifikasinya itu lewat bukti, ya?

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: COSMAS REFRA

Ya.

243. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Karena kita belum persidangan lanjutan. Jadi, bukti Anda sudah lengkap belum? Terkait dengan waktunya yang Anda ajukan itu?

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: COSMAS REFRA

Yang Mulia, ingin kami sampaikan bahwa tanggal 18, Waktu Indonesia Timur, pukul 23.00 WIT, itu proses online sudah berlangsung dari sana, Bu.

245. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: COSMAS REFRA

Hanya karena kendala sinyal, akhirnya kami dipandu oleh pegawai Panitera Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pendaftaran. Dan terakhir, waktunya bergeser ke (...)

247. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya begini. Jadi, semua ... ini kan kita belum pembuktian, ya?

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: COSMAS REFRA

Baik, Ibu.

249. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Belum tahapan pembuktian.

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: COSMAS REFRA

Siap.

251. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, belum bisa lebih jauh. Sehingga sekarang baru klarifikasi terhadap bukti-bukti yang diajukan semua pihak terhadap apa yang disampaikan tadi. Jadi, kalau anda silakan sampaikan buktinya itu daripada bukti, selama persidangan ini masih berlangsung.

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: COSMAS REFRA

Terima kasih.

253. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, silakan tadi mau tambahkan bukti apapun, itu silakan selama persidangan masih berlangsung, ya?

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: COSMAS REFRA

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

255. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya? Silakan begitu.

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: COSMAS REFRA

Ya siap.

257. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, saya perlu menambahkan. Jadi, nanti kalau sidang perkara ini dilanjutkan lagi, nanti masih bisa juga alat bukti lain ... tambahan. Pemohon, Termohon, kemudian Pihak Terkait dan Bawaslu, ya? Jadi, terlepas dari bukti yang sudah diajukan sekarang ini, begitu ya? Dan tadi juga sudah disampaikan sebelum sidang, sekiranya ada ... apa ... perbaikan, renvoi, sepanjang bukan substansi, bisa dilakukan selama sidang ini berlangsung termasuk bukti tambahan kalau ada, begitu.

Baik, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-43, benar Termohon?

258. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: HELMI

Benar, Yang Mulia.

259. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait T ... PT-1 sampai dengan PT-26, benar?

260. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021 DAN PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: ELIEZER MURAFER

Benar, Yang Mulia.

261. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian Bawaslu mengajukan PK-1 sampai dengan PK-28, benar?

262. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: ZAENAL SINERI

Benar, Yang Mulia.

263. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: CORNELIA MAMORIBO

Benar, Yang Mulia.

264. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Dengan catatan keterangan asli belum diserahkan. Nanti ya, diserahkan setelah sidang ini ditutup.

265. BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA: CORNELIA MAMORIBO

terima kasih, Yang Mulia.

266. KETUA: ANWAR USMAN

Ya baik. Hasil dari persidangan kedua perkara ini akan dilaporkan atau disampaikan dalam rapat permusyawaratan hakim.

Kemudian, bagaimana kelanjutan dari kedua perkara ini, Para Pihak tinggal menunggu panggilan atau pemberitahuan dari kepaniteraan, ya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 1X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.54 WIB

Jakarta, 8 Februari 2021

Panitera, **Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

